

ABSTRAK

Nama : Intan Widyaningtias

Program Studi : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Judul : Implementasi Perda No.7 Tahun 2008 Terkait Perizinan Rumah Pemdondokan Kabupaten Jember Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penelitian di latar belakang oleh permasalahan perizinan rumah pemondokan (indekos) karna banyak nya pengusaha yang tidak memiliki surat izin usaha rumah pemondokan (indekos), Proses pembuatan izin rumah pemondokan sudah merupakan hal yang mendapat perhatian mendasar, termasuk bagi publik di Kota Jember, karena dengan tidak adanya surat izin keadaan rumah pemondokan (indekos) bisa di salah gunakan dan bisa menjadi tempat yang ilegal. Adanya surat izin rumah pemondokan untuk mengurangi pergaulan bebas terhadap penghuni rumah pemondokan. Keberadaan rumah pemondokan (Indekos) di Kota Jember dapat berpengaruh terhadap nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat setempat serta tertib administrasi kependudukan dan untuk memelihara nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat, mewujudkan ketertiban umum, tertib administrasi kependudukan, dan kelestarian lingkungan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam permohonan perizinan. Dinas Sosial menjadi penanggung jawab sepenuhnya dalam melaksanakan kebijakan, dan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertanggung jawab sebagai administratif. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran dari standar operasional yang telah ditetapkan, maka pemerintah Kabupaten Jember harus memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha rumah pemondokan berdasarkan standar tempat hunian yang di sewakan (Indekos). Pelaksanaan izin rumah pemondokan menurut Perda No. 7 Tahun 2008 di Kabupaten Jember telah diatur secara jelas dan tegas, namun keberadaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pemondokan di Kabupaten Jember hingga kini belum berjalan efektif.

Kata kunci : *implementasi, Peraturan Daerah, Perizinan Rumah Pemdondokan*

ABSTRACT

Name : Intan Widyaningtias
Study Program : Social and Political Sciences
Title : Implementation of Regional Regulation No.7 of 2008 Regarding Jember Regency Housing Licensing in the Investment and One-Stop Integrated Services Office

Background research on the problem of boarding house permits (boarding) because many businessmen do not have boarding house permits (boarding house). the permit for boarding house conditions (boarding house) can be misused and can become an illegal place. The existence of a boarding house permit to reduce the promiscuity of the residents of the boarding house. The existence of boarding houses (boarding houses) in the City of Jember can affect the social and cultural values of the local community as well as orderly population administration and to increase the social and cultural values of the community, create public order, orderly population administration, and preserve the environment. The One Stop Investment Service and Integrated Service which aims to facilitate the community in applying for permits. The Office of Social Affairs is responsible for implementing the policy, and the PMPTSP Office is responsible for administration. To ensure the safety of the operational standards that have been set, the Jember Regency government must pay attention to everything related to the boarding house business based on the standard of the rented shelter (Indekos).

The implementation of the residence permit according to regional regulation no. 7 of 2008 in Jember Regency has been regulated clearly and firmly, but the existence of Regional Regulation Number 7 of 2008 concerning Lodgings in Jember Regency has not been effective.

Key words: *implementation, local regulations, housing permits*